



Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Vera Vebrianti Luawo¹, Saprudin², Onong Junus³, Wahyudin Hasan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Gorontalo/Jl. A. A. Wahab No. 247, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo/Indonesia

Email: veraluawo19@gmail.com¹, saprudin545@gmail.com², onong_ug@yahoo.co.id³, wahyudinhasan99@gmail.com⁴

Citation: Luawo, V. V., Saprudin., Junus, O., & Hasan, W. (2025). Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 237-244. DOI: [10.32662/gaj.v8i1.4466](https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.4466)

Artikel info

Artikel history:

Received: 19-01-2025

Revised: 07-02-2025

Accepted: 29-04-2025

Abstract. *This study aims to analyze the effect of Gender-Responsive Planning and Budgeting on the effectiveness of budget implementation in Regional Government Organizations (OPD) in Gorontalo Regency. Involving 64 respondents from 32 OPDs and using multiple regression analysis, the results show that Gender-Responsive Planning does not have a significant effect due to the mismatch between budget realization and the planned targets. In contrast, Gender-Responsive Budgeting has a significant effect; however, limited budget allocations, particularly the decrease in General Allocation Funds (DAU), hinder gender equality programs. Therefore, the Inspectorate's supervision is essential to ensure consistency between planning, budgeting, and budget implementation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran OPD di Kabupaten Gorontalo. Dengan melibatkan 64 responden dari 32 OPD dan menggunakan regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Responsif Gender tidak berpengaruh signifikan karena realisasi anggaran tidak sesuai rencana. Sebaliknya, Penganggaran Responsif Gender berpengaruh signifikan, namun terbatasnya alokasi dana, terutama penurunan DAU, menghambat program kesetaraan gender. Oleh karena itu, pengawasan Inspektorat diperlukan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran.

Keywords:

Gender-Responsive Planning; Gender-Responsive Budgeting; Budget Effectiveness

Corresponden author:

Email: saprudin545@gmail.com

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah (Haryanto, 2008). Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses perencanaan penganggaran yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik, memenuhi prioritas belanja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Kurniawan & Fridiyanti, 2023). Namun, dalam praktiknya, pembangunan di era desentralisasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam keterlibatan masyarakat dalam perencanaannya.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berdampak pada tidak responsifnya anggaran daerah terhadap isu gender. Kondisi ini mengakibatkan tujuan dan target kebijakan pembangunan tidak dapat tercapai secara optimal (Kurniawan & Fridiyanti, 2023). Sebagian besar masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah belum menerapkan prinsip efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik yang tersedia untuk kepentingan masyarakat (Abdullah, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dapat memastikan akses yang adil, manfaat yang setara, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya (Kurniawan & Fridiyanti, 2023).

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, mengurangi kesenjangan gender, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif (Kurniawan & Fridiyanti, 2023). Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang transparan dan akuntabel (Usu et al., 2022).

Menurut Oktaria (2015), Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. ARG ini tercermin dalam dokumen perencanaan seperti KUA-PPAS, RKA SKPD, dan DPA SKPD. Dengan adanya ARG, diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap layanan publik serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nurhaeni et al. (2011) menekankan bahwa anggaran yang tidak mempertimbangkan kesetaraan gender sering kali mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok masyarakat tertentu, yang pada akhirnya berimplikasi pada ketidakseimbangan manfaat pembangunan.

Beberapa penelitian sebelumnya mengukur efektivitas anggaran berdasarkan tingkat realisasi anggaran terhadap target yang telah ditetapkan. Sumenge (2013) menyatakan bahwa efektivitas anggaran dapat diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja terhadap target, di mana anggaran dikatakan efektif jika realisasinya mencapai 90%-100%. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas anggaran di berbagai daerah masih bervariasi. Misalnya, Rampengan (2016) menemukan bahwa pengelolaan anggaran belanja di BAPPEDA Kota Manado belum efektif karena realisasi anggaran yang masih jauh dari target. Sementara itu, Purba & Silalahi (2021) menemukan bahwa efektivitas anggaran belanja di Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah mendekati target yang ditetapkan.

Menurut teori efektivitas Mardiasmo (2021), efektivitas tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari pencapaian tujuan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Efektivitas anggaran harus mencerminkan hubungan antara keluaran (output) dan dampak (outcome) terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan PPRG dapat menjadi salah satu indikator efektivitas pelaksanaan anggaran karena melibatkan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga alokasi dana dapat lebih tepat sasaran (KPPPA, 2010).

Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, data BPS (2023) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih cukup rendah, yakni 82,72%. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan gender yang masih terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan PPRG agar pembangunan daerah dapat merespons kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat (Turama, 2020). Namun, implementasi PPRG di Kabupaten Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman pengambil kebijakan terhadap pentingnya isu gender, kurangnya kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta persepsi bahwa anggaran bias gender sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum (KPPPA, 2010; Kurniawan & Fridiyanti, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Perencanaan dan Penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah responsif gender dan apakah penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender dapat berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gorontalo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 64 orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan Pejabat Fungsional Perencana yang ada pada 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X1 dan X2) dengan variabel dependen (Y). Adapun rumus analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana:

Y = Variabel Dependen (Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah)

X1 = Variabel Bebas (Perencanaan responsif gender)

X2 = Variabel Bebas (Penganggaran responsif gender)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi X1 dan X2 terhadap Y

e = Nilai Residu

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah tahapan pengujian uji asumsi klasik selesai dan menunjukkan hasil secara keseluruhan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik, maka dilakukan tahapan berikut yaitu mengevaluasi dan menginterpretasi model regresi berganda.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	3.174	4.217		.752	.458
1	Perencanaan Responsif Gender	.275	.147	.322	1.872	.071
	Penganggaran Responsif Gender	.415	.160	.445	2.591	.015

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 1, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 3,174 + 0,322 X_1 + 0,445 X_2 + + e$$

Model regresi ini menunjukkan bahwa jika variabel Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender bernilai nol, maka rata-rata efektivitas adalah 3,174. Nilai koefisien regresi untuk variabel Perencanaan Responsif Gender sebesar 0,322 dengan tingkat signifikansi 0,071 ($> 0,05$), yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam variabel ini meningkatkan efektivitas sebesar 0,322, namun pengaruhnya kurang signifikan. Sementara itu, variabel Penganggaran Responsif Gender memiliki koefisien regresi sebesar 0,445 dengan signifikansi 0,015 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam variabel ini meningkatkan efektivitas sebesar 0,445, dan pengaruhnya signifikan.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari pengujian uji parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Uji t

		Coefficients^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	3.174	4.217		.752	.458
1	Perencanaan responsif Gender	.275	.147	.322	1.872	.071
	Penganggaran Responsif Gender	.415	.160	.445	2.591	.015

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: Data Diolah (2024)

Melalui statistik uji t menunjukkan pengaruh parsial dari variabel Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan output Coefficients di atas, dapat dijelaskan hasil uji t (uji parsial) sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Nilai t hitung untuk variabel Perencanaan adalah 1,872 dengan Nilai signifikansi untuk variabel Perencanaan adalah 0,071 ($> 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel Dependen efektivitas pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Nilai t hitung untuk variabel Penganggaran adalah 2,591 dengan Nilai signifikansi untuk variabel Penganggaran adalah 0,015 ($< 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa variabel Penganggaran signifikan dalam mempengaruhi variabel Dependen efektivitas pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji Koefisien Determinasi atau disebut juga dengan R² bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen atau terikat (Efektivitas Pelaksanaan Anggaran) dijelaskan oleh variabel bebas atau independen seperti Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender.

Tabel 3. Hasil Uji R²

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695 ^a	.483	.447	1.958

a. Predictors: (Constant), x₂, x₁

b. b. Dependent Variable: y

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinan (R²) 0,483 atau 48%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Efektivitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 48%. Sedangkan sisanya 52% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Responsif Gender terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Responsif Gender di Kabupaten Gorontalo tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran OPD, meskipun pelaksanaannya sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya regulasi yang mewajibkan OPD melaksanakan Perencanaan Responsif Gender, penggunaan data terpilah dalam perencanaan anggaran, serta keberadaan SDM terlatih (Pemda Gorontalo, 2020). Bahkan, Kabupaten Gorontalo menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya pada tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Namun, efektivitas pelaksanaan anggaran OPD masih belum optimal karena beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan, keterbatasan anggaran APBD, lemahnya fungsi pengawasan Inspektorat, rendahnya komitmen pemangku kebijakan, serta adanya faktor eksternal seperti peran sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Hal ini tidak sejalan dengan pedoman (KPPPA (2010) yang menyatakan bahwa Perencanaan Responsif Gender seharusnya menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.

Ketidakefektifan ini juga bertentangan dengan teori efektivitas Mardiasmo (2021), yang menekankan bahwa efektivitas suatu kebijakan diukur dari sejauh mana tujuan dan sasarannya tercapai. Agar anggaran OPD lebih efektif, diperlukan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda; Setyawan et al. (2018) menemukan bahwa Perencanaan Responsif Gender berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran, sementara Oktaria (2015) menyatakan bahwa perencanaan tidak selalu menjamin anggaran yang berpihak pada keadilan gender.

Secara keseluruhan, Perencanaan Responsif Gender merupakan tahapan penting dalam siklus penganggaran. Perencanaan yang matang akan membantu pelaksanaan anggaran berjalan lebih efektif dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan responsif gender menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran OPD.

Pengaruh Penganggaran Responsif Gender terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Penganggaran Responsif Gender berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran OPD. Persentase anggaran yang responsif gender masih minim dan bahkan menurun dari tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada terbatasnya program dan sarana prasarana yang mendukung kesetaraan gender di Kabupaten Gorontalo. Hal ini sejalan dengan penelitian Indriyanti et al (2021), namun berbeda dengan Rampengan et al. (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas anggaran cukup diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan target anggaran.

Menurut Mardiasmo (2021), efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan dan dampaknya terhadap masyarakat. Meski Pemerintah Daerah telah berkomitmen terhadap Penganggaran Responsif Gender, keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran para pengambil kebijakan menjadi kendala utama. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) OPD serta ketiadaan anggaran yang memadai untuk merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan.

Teori Manajemen Keuangan Sektor Publik Mardiasmo (2009) menekankan bahwa penganggaran yang terpadu, efisien, dan efektif berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi sektor publik, termasuk OPD. Penelitian ini juga sejalan dengan Mardiasmo (2009), yang menemukan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan tujuan, dan pengawasan yang baik dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.

Namun, penerapan Penganggaran Responsif Gender masih menghadapi berbagai kendala, seperti berkurangnya alokasi DAU OPD, rendahnya pemahaman para pengambil kebijakan, kurangnya kesiapan SDM, serta persepsi bahwa anggaran bias gender sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penganggaran yang berkualitas, terencana dengan baik, dan sesuai prioritas daerah sangat diperlukan agar setiap program dan kegiatan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup dan tepat sasaran.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa Penganggaran Responsif Gender memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran OPD.

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan responsif gender di Kabupaten Gorontalo tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran OPD karena realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sebaliknya, penganggaran responsif gender terbukti berpengaruh signifikan, namun keterbatasan alokasi dana yang dipengaruhi oleh penurunan DAU dan minimnya dukungan dana pemerintah daerah menghambat pelaksanaan program serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung kesetaraan gender.

Disarankan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah perlu memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran. Peran Inspektorat juga sangat penting dalam memperkuat fungsi pengawasan agar implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender berjalan lebih efektif. Selain itu, diperlukan strategi optimalisasi sumber pendanaan alternatif guna mendukung program kesetaraan gender secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Haryanto. (2008). *Manajemen Keuangan Daerah: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2010). *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender*. Jakarta: KPPPA.
- Kurniawan, A., & Fridiyanti, N. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penganggaran Responsif Gender di Indonesia*. *Jurnal Keuangan Publik*, 15(2), 45-60.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurhaeni, S., Rahayu, T., & Suryani, R. (2011). *Analisis Dampak Anggaran Responsif Gender terhadap Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 112-130.
- Oktaria, R. (2015). *Implementasi Perencanaan Responsif Gender dalam Penyusunan APBD di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 88-105.
- Purba, Y., & Silalahi, D. (2021). *Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Kota Tebing Tinggi: Studi Kasus dan Evaluasi Kinerja*. Medan: Penerbit USU Press.
- Rampengan, F. (2016). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di BAPPEDA Kota Manado*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(3), 67-85.
- Sumenge, T. (2013). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah: Studi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 5(1), 99-120.
- Turama, P. (2020). *Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Usu, R., Ahmad, T., & Suryanto, A. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Perspektif Masyarakat dan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 55-72.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gorontalo*. Jakarta: BPS.
- Indriyanti, R., Susanti, A., & Rahmawati, N. (2021). *Evaluasi Implementasi Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Gorontalo*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 120-135.
- Mardiasmo. (2009). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Oktaria, R. (2015). *Implementasi Perencanaan Responsif Gender dalam Penyusunan APBD di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 88-105.
- Pemerintah Daerah Gorontalo. (2020). *Laporan Implementasi Perencanaan Responsif Gender di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020*. Gorontalo: Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
- Rampengan, F., Sutrisno, B., & Handayani, T. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah: Studi pada BAPPEDA Kota Manado*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(3), 67-85.
- Setyawan, D., Prasetyo, H., & Wardani, L. (2018). *Dampak Perencanaan Responsif Gender terhadap Efektivitas Anggaran Pemerintah Daerah*. Jurnal Keuangan Publik, 15(1), 45-60.